

Pelanggaran HAM di Timika

Pertengahan tahun 1995, masyarakat dikejutkan oleh pembunuhan rakyat di Timika, Irian Jaya. Masalahnya menjadi serius karena melibatkan beragam unsur, dan menjadi kasus yang berlarut-larut

oleh Redaksi

Laporan Komnas HAM

Tanggal 22 September 1995 Komnas HAM telah mengemukakan hasil penyelidikannya tentang terjadinya pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan, pengawasan, perusakan hak milik dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang terhadap penduduk Timika, Fak-Fak, Irian Jaya. Laporan Komnas HAM ini membenarkan laporan Uskup Jayapura, HFM Munninghoff ofm. Berbeda dengan laporan Munninghoff, Komnas HAM tidak menunjukkan keterlibatan PT Freeport dalam kasus pelanggaran

HAM yang terjadi.

Laporan Uskup Munninghoff dengan jelas menyebutkan bahwa beberapa fasilitas PT Freeport telah digunakan selama pelanggaran HAM terjadi di Timika.

Tapi terlepas dari perbedaan itu, Komnas HAM menemukan data yang lebih rinci dari apa yang dilaporkan Munninghoff, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran yang belum terkuak. Saksi yang dihubungi dalam investigasi itu juga lebih banyak. Sayangnya hubungan antara militer, PT Freeport, Penda dan kepentingan pusat yang mewarnai persoalan di Timika ini, tidak terungkap.

Langkah maju dari penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Timika adalah dikeluarkannya rekomendasi untuk memulihkan kondisi hak asasi manusia. Untuk itu Komnas HAM memberi rekomendasi agar aparat keamanan yang melanggar HAM diproses melalui pengadilan; korban atau keluarga korban pelanggaran HAM mendapat kompensasi; dan wewenang perusahaan Freeport dan pihak keamanan di

Laporan Munninghoff dengan jelas menyebutkan bahwa beberapa fasilitas PT Freeport telah digunakan selama pelanggaran HAM terjadi di Timika.

EDITORIAL	2
TIMIKA	
Pelanggaran HAM di Timika	1
Perlawanan Terhadap Freeport	4
Pengadilan Para Tersangka Kasus Timika	4
Masyarakat Amungme Berjuang ke Jakarta	5
Freeport dan Orang Amungme	5
DISKUSI	
Menyerap Norma Internasional Menjadi Hukum Nasional	6
BURUH	
Buruh CV Maska Jombang Berjuang	8
Kronologi Aksi Buruh Jombang	9
Buruh Mogok Menuntut UMR dan Hak Berorganisasi	10
Buruh Kontrak	11



EDITORIAL

Salam perkenalan,

Ini adalah nomor perdana *newsletter* Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, yang kami beri nama yang mudah diingat: **ASASI**. Gagasan yang melatarbelakangi *newsletter* ini sederhana, sesederhana formatnya. Tidak segegap gempita, misalnya, ide yang melatarbelakangi pers alternatif yang tengah menjamur sekarang ini. Newsletter ini bertolak dari keinginan mengungkapkan kembali kepada publik, informasi-informasi yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori pelanggaran berat (*gross-violation*) di sektor-sektor perburuan, tanah dan masyarakat adat (*indigenous people*), berdasarkan investigasi dan dokumentasi kasus-kasus tersebut.

ASASI, juga dimaksudkan sebagai media informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di sektor-sektor yang disebutkan di atas. Publik yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada kalangan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Inilah alasan dari kehadiran **ASASI**.

Pada nomor perdana ini kami menurunkan kasus Timika sebagai *focus-issue*. Kami mengharapkan, pilihan ini, dapat melengkapi informasi dan pengetahuan anda akan kasus ini. Selamat membaca.

ASASI diterbitkan oleh ELSAM
(Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat)
Jl Kampung Melayu Besar 44
Jakarta 12840
Tel (021) 829 6905
Facs (021) 835 3690
E-mail: elsam@nusa.or.id

Penanggung Jawab
Abdul Hakim GN

Redaksi
Agung Putri - Amiruddin
Ildhal Kasim - Widoyoko

Timika diberi batasan yang jelas. Langkah maju Komnas HAM ini bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat untuk mengawasi tindakan-tindakan aparat publik.

Laporan Munninghoff

Menurut laporan HFM Munninghoff sepanjang tahun 1994 dan 1995 telah terjadi serangkaian tindak kekerasan terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro yang tinggal di Timika, Irian Jaya. Wilayah tersebut masuk di bawah kekuasaan PT Freeport.

Tindak kekerasan aparat militer tersebut terjadi setelah masyarakat mengungkapkan rasa tidak puasnya pada PT Freeport yang merampas tanah dan meneemari lingkungan mereka. Korban dari tindakan kekerasan aparat keamanan ini adalah penduduk sipil — tanpa senjata dan tanpa perlawanan — mulai dari anak-anak sampai pada perempuan dan laki-laki dewasa.

Tindak kekerasan dilakukan oleh pasukan ABRI dari Batalyon 733 Patimura dan Batalyon 752 Paniai yang bertugas di beberapa wilayah Irian Jaya, terutama di sekitar wilayah Freeport. Ragam tindak kekerasan aparat keamanan dapat kita lihat dalam beberapa uraian fakta yang ada.

Aksi pembunuhan kilat terjadi sebanyak 5 kali sejak tanggal 25 Desember 1995 sampai 31 Mei 1995 di daerah Mile 66 Timika, bengkel Freeport. Koperapoka tanggal 25 Desember 1994 oleh Pasukan Mess Paripurna. Dua pembunuhan juga terjadi di Desa Harapan, Kwamki Lama Timika tanggal 16 April 1995 dengan senjata api oleh pasukan Batalyon 733 Patimura. Penembakan massal terhadap penduduk terjadi di Desa Hoes yang menelan korban 11 orang yang dilakukan oleh Letnan Mardjaka dari Batalyon 752 Paniai.

Penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan dilakukan terhadap lima orang keluarga Kwalik. Mereka hilang setelah ditangkap oleh aparat keamanan tanggal 6 Oktober 1994 di kediaman masing-masing. Menurut laporan, mereka terakhir ditahan di pos tentara Koperapoka. Setelah dibawa ke Koramil Timika, kelima orang ini menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi oleh kerabatnya. Tanggal 9 Oktober 1994 terjadi lagi penangkapan terhadap lima penduduk sipil oleh Batalyon 752 Paniani. Mereka 'dititipkan' di Polsek Timika sebagai tahanan Angkatan Darat. Tanggal 25 Desember pasukan dari Batalyon 733 Patimura menangkap 15 orang yang kemudian disekap di *container* milik Freeport di Koperapoka. Tanggal 26 Desember 1994 4 orang sipil ditangkap lagi oleh pasukan dari Batalyon 733 dan 752 Banti dan ditahan di Pos Security Freeport dalam satu *Container*. Penangkapan terus berlanjut antara 29 Desember sampai 8

Januari terhadap 16 orang warga sipil yang bekerja sebagai buruh Freeport dan dua orang kepala suku.

Semua korban penangkapan di atas mengalami siksaan karena menolak mengaku sebagai anggota OPM yang mengibarkan bendera di Tembapapura, Bella dan Lembah Tsinga pada bulan Juni dan tanggal 25 Desember 1994. Selain itu penduduk juga mengalami pengawasan yang serba ketat dan perusakan hak milik oleh aparat keamanan.

Setelah terjadi peristiwa pengibaran bendera bulan Juni di Lembah Tsinga terjadi pertempuran antara ABRI dengan OPM. 250 orang warga yang terjepit di tengah pertempuran itu lari masuk hutan untuk menyelamatkan diri. Warga yang menyelamatkan diri ke hutan dituduh dan dicurigai sebagai OPM oleh pihak militer. Anggota ABRI merusak ladang, tumbuhan dan rumah penduduk. Dalam pertempuran yang sifatnya sporadik ini 10 orang sipil telah terbunuh (9 di Amungme dan 1 di Biak). Dalam rangka mencari anggota OPM, beberapa penduduk sipil ditangkap, terutama dari keluarga Kwalik.

Tanggal 25 Desember 1994 anggota ABRI dan keamanan Freeport menangkap 13 warga sipil dari Waa dan Banti. Lima orang Dani hilang dan tiga warga sipil mati setelah adanya peristiwa pengibaran bendera di Mil 68. 13 orang sipil yang ditangkap itu kemudian mengalami siksaan karena menolak tuduhan bekerjasama dengan OPM. 12 dari 13 orang ini kemudian dibebaskan setelah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bekerja sama dengan OPM. sementara satu orang tetap ditahan karena tidak mau menandatangani.

Selama tujuh bulan, mulai dari Juli 1994 sampai Januari 1995, 250 warga berkelirisan di hutan untuk menyelamatkan diri. Setelah ada perundingan antara pimpinan masyarakat dengan ABRI, mereka diperbolehkan kembali ke Tsinga pada tanggal 5 Pebruari dan ditampung di gereja. 250 orang penduduk sipil ini oleh militer dinyatakan sebagai anggota OPM yang menyerahkan diri.

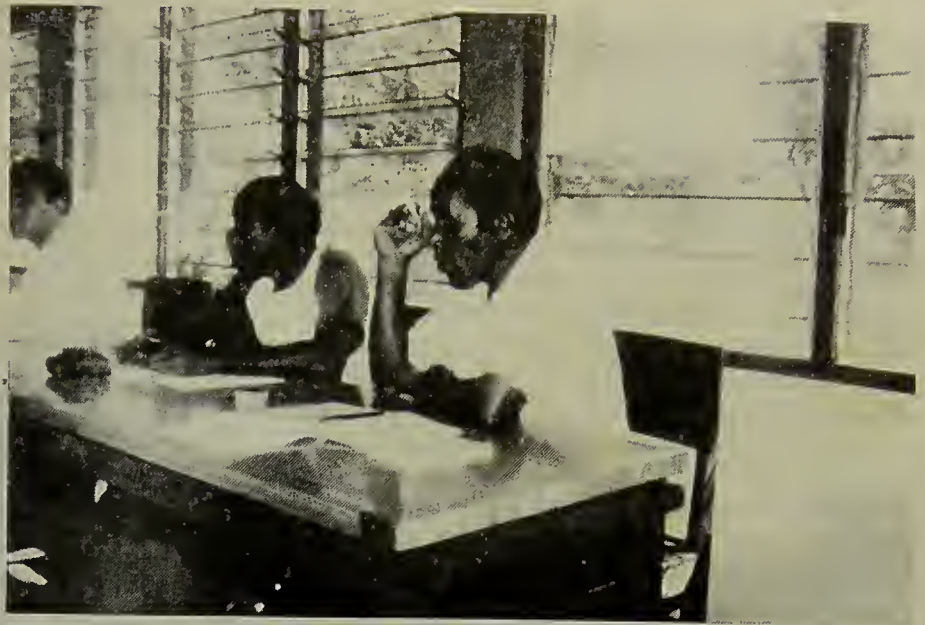
- Atas pelanggaran HAM yang berat ini Komnas HAM dalam rekomendasinya meminta pemerintah membayar kompensasi kepada keluarga korban. Rekomendasi seperti ini untuk pertama kalinya dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Meskipun begitu masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 1994 di Irian Jaya, yang belum diungkap oleh Komnas HAM dan Uskup Munninghoff.

Perluasan Wilayah Freeport dan Dampaknya

Kekerasan pihak keamanan hanyalah sepenggal penderitaan masyarakat Amungme

Masalahnya bukan hanya pelanggaran hak-hak adat, tapi juga perusakan lingkungan yang serius sekarang dan di masa depan.



dan Kamoro di Timika. Nasib buruk lainnya adalah kehilangan hak atas tanah yang telah mereka diami selama ribuan tahun. Kehilangan hak atas tanah ini terjadi setelah Presiden Soeharto membubuhkan tandatangannya 1 April 1967 untuk konsesi operasional penambangan tembaga di pegunungan Cartenz oleh PT Freeport Indonesia Corporation dengan modal awal US\$ 75 juta. Pada tahun 1973 modal yang diinvestasikan PT FIC telah mencapai US\$ 175 juta. Perkembangan luas konsesi itu sampai saat ini telah mencapai 2.7 juta Ha, yang meliputi gunung, lembah, sungai sampai ke pantai Arafuru.

Tahun 1967 suku Amungme dan Kamoro telah kehilangan 10.000 Ha tanah, yang disusul dengan 7000 Ha untuk pembukaan kota Timika pada tahun 1983-85 dan 25.000 Ha untuk pembukaan kota baru (Kuala Kencana). Sekitar satu juta Ha dipakai untuk kepentingan transmigrasi, yang melahirkan sejumlah persoalan baru di wilayah itu. Tahun 1988 lokasi pertambangan di Ertsberg habis dan eksploitasi diperluas ke Ertsberg Timur. Pada tahun 1989 Freeport telah menguasai 2.5 juta Ha. Tahun 1990 dimulai persiapan penambangan emas dan tembaga di Grasberg sementara tahun 1994 ditemukan salah satu areal penghasil emas dan biji besi terbesar di dunia.

PT Freeport bergerak cepat dan pada tahun 1991 mereka telah memperpanjang masa operasinya selama 30 tahun dengan dua kali 10 tahun masa perpanjangan.

Tanah yang dikuasai PT Freeport ini dipagari dengan kawat berduri sehingga tidak memungkinkan lagi bagi orang Amungme untuk masuk. Sebagian dari lembah Tsinga juga berdiri sejumlah perusahaan HPH, salah satunya Jayanti Grup. Perusahaan-perusahaan ini dijaga oleh pos-pos militer dan kawat berduri sepanjang mile 68-74.

Negara menjadikan tanah adat sebagai tanah negara di luar kesadaran dan pengetahuan penduduk asli. Saat ini PT Freeport bekerjasama dalam pembebasan tanah dengan PT Alatief yang juga akan mengelola wilayah konsesi tersebut dalam bidang real-estate.

Kegiatan PT Freeport sejak tahun 1967 membawa berbagai dampak lingkungan, misalnya pembuangan limbah tambang di aliran sungai yang kemudian mencemari sungai Kamoro dan Ajikwa serta Otakwa dan Minajerui. Sekitar 50.000 ton limbah tambang di sungai Ajikwa telah membawa bencana yang menewaskan hampir 260 anak-anak. Menurut diagnosa dokter, keguguran ibu hamil dan meninggalnya anak-anak adalah akibat minum air sungai yang tercemar sejak tahun 1980-an. Sungai Ajikwa bahkan pernah meluap dan merendam perkampungan dan tanaman karena alirannya terhalang dan berubah. Akibat luapan ini banyak sumber makanan masyarakat seperti sagu, mati karena limbah tambang.

Sangat ironis bahwa masyarakat yang biasanya berlimpah dengan air bersih dan dapat menggunakan sumber daya air sungai dengan leluasa kini menjadi pengkonsumsi air hujan yang ditampung dengan drum-drum bekas minyak dari PT Freeport.

Meluasnya wilayah konsesi PT Freeport juga membuat ribuan orang terusir dari tempat asalnya. Mereka kemudian masuk ke hutan mencari pemukiman baru. Pencarian pemukiman tersebut menimbulkan perang antar suku yang tidak mau wilayahnya diisi

oleh suku lain. Sedangkan mereka yang tidak pergi ke hutan dipindahkan ke wilayah lain secara paksa dengan sebutan transmigrasi. Secara konseptual, sangat aneh bahwa ada orang yang memiliki tanah di tanah kelahirannya sendiri harus "transmigrasi".

Nasib buruk masyarakat suku Amungme dan Kamoro tersebut dipertajam dengan hadirnya militer sebagai penjaga keamanan "aset nasional" ini. Militer kerap melakukan intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pembunuhan, apalagi jika ada usaha perlawanan dari penduduk.

Pembangunan yang digembar-gemborkan PT Freeport dan Pemda Irian Jaya kebanyakan memang untuk kepentingan Freeport sendiri, seperti perkotaan, jalan raya dan pelabuhan. Menurut Tom Beanal, salah satu ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), pembangunan yang dibuat PT Freeport antara lain menghasilkan 90% anak-anak Amungme tidak lulus SD. Ia juga mengeluhkan tindakan tidak manusiawi, pekerjaan "pembangunan" oleh rakyat setempat yang hanya dibayar dengan sekaleng cornet, gula atau kopi.

Masyarakat atau penduduk asli di wilayah Freeport menghadapi persoalan pelanggaran HAM mulai dari tingkat kehidupan individu sehari-hari sampai ke tingkat lingkungan sosial yang lebih luas seperti pencemaran lingkungan, kehilangan hak adat atas tanah, politik, keamanan dan hak ekonomi. Sementara itu masyarakat sendiri juga dihantui oleh ketakutan akibat intimidasi ABRI di satu sisi, dan tuduhan pengkhianatan oleh OPM. (R)

Perlawanan Terhadap Freeport

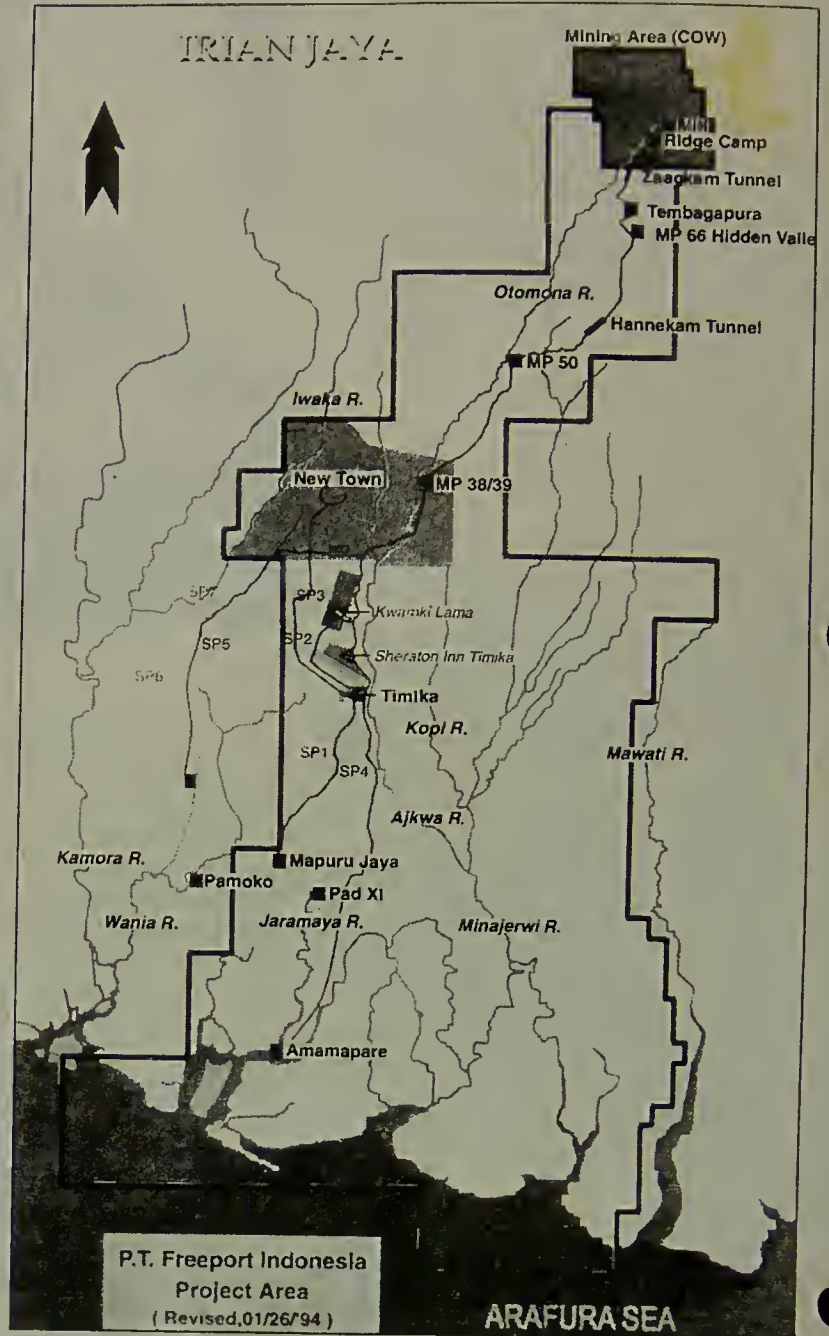
1972 Paitua Tuwarek memprotes kehadiran Freeport di atas tanahnya dengan membuat patok-patok dan melarang orang Freeport masuk. 1973 terjadi perkelahian massal karena masyarakat marah. Pitagorome Beel membongkar dan membakar bangunan PT Freeport karena memperlebar lokasi secara semena-mena.

Tahun 1977 mengadakan perlawanan besar-besaran dengan memotong pipa-pipa milik Freeport, membuka dan membakar tangki minyak. Tindakan ini sempat membuat produksi Freeport terhenti sementara. Akhir dari aksi ini banyak penduduk yang diinterogasi dan dieuri-gai. Takut atas perlakuan pihak keamanan mereka akhirnya lari ke hutan. Segera setelah itu tentara menguasai daerah itu, rumah dan kebun penduduk dibakar agar mereka tidak kembali lagi. Penjagaan diperketat dan intensif dan semenjak itu penduduk tidak pernah lagi muncul di situ. Setelah tiga tahun di hutan karena malaria dan kolera serta kelaparan, akhirnya mereka ke luar dan menyerah pada tentara. Kemudian mereka dimukimkan dekat kota agar mudah diawasi dan jauh dari OPM.

Tahun 1985, ibu-ibu setempat melakukan aksi perlawanan dengan mencegat orang-orang yang akan bekerja di areal tambang.

Tahun 1990 kembali mereka mendatangi bandara Timika dan membakarnya beserta hotel. Kemarahan ibu-ibu itu terjadi karena tanah mereka diambil begitu saja.

1993 rakyat memblokir areal untuk pembangunan kota baru (Kuala Kencana) sebagai perluasan Timika karena merampas tanah rakyat. Proses pengaliberalihan tanah tersebut dilakukan dengan paksa oleh aparat, jika penduduk menolak mereka akan diintimidasi atau dituduh GPK. Untuk melakukan berbagai intimidasi tersebut telah digunakan fasilitas Freeport seperti kontainer untuk tahanan, bus untuk mengangkut personil dan kemudian digunakan untuk menangkap dan menculik penduduk. (R)



Pengadilan Para Tersangka Kasus Timika

Pangdam Trikora dalam pengumumannya mengatakan para pelaku penembakan di Timika akan diadili pada bulan Januari 1996. Tetapi anehnya untuk menghadirkan saksi di pengadilan. Tim Peyidik Kodam VIII/Trikora pada tanggal 2 November 1995 telah mempersiapkan 12 orang saksi meringankan. Ke 12 orang saksi tersebut akan diminta kesaksiannya mengenai penembakan kilat 11 orang warga sipil di kampung Agani, Hoca. Para saksi tersebut tidak bersal dari desa Agani tempat penembakan terjadi — tempat sebelumnya Komnas HAM telah meminta

keterangan — tetapi dari kampung Boenekwilik. Saksi di persidangan bukanlah saksi yang telah diminta keterangannya oleh POMDAM VIII Trikora atau saksi yang telah memberikan keterangan pada Komnas HAM. Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) menilai kesaksian para saksi tersebut palsu dan tidak dapat dibenarkan.

Sebelum diminta kesaksiannya para saksi ini terlebih dahulu ditempatkan di Koramil Timika. Para saksi adalah para Tenaga Bantuan Operasi (TBO) yang sering membantu operasi dan kegiatan militer lainnya di wilayah tersebut.

Salah seorang tersangka Letnan Inf. Mardjaka (33) hanya dijatuhi hukum 1,6 tahun penjara dengan potong masa tahanan

dan dipecat dari kedinasan militer. Mardjaka ini yang telah memerintahkan anak buahnya dari Kompi A Yonif 732 Banau Ternate. Praka Titus Kobagau untuk menembak penduduk jika tidak mau dipanggil oleh petugas di desa Hoca. Setelah penembakan terjadi Mardjaka memberikan laporan palsu kepada komandannya, dan mengatakan yang ditembak adalah anggota GPK.

Sidang kasus Letnan Mardjaka ini menurut masyarakat, melalui LEMASA, tidak memperlihatkan sidang yang adil karena banyak kejanggalan dalam kesaksian. Dokumen persidangan dinyatakan tidak terbuka untuk umum padahal sidang ini bersifat sidang umum. (R)

Masyarakat Amungme Berjuang ke Jakarta

Pernyataan Komnas HAM tentang 16 orang terbunuh dan 4 hilang dalam kasus pelanggaran HAM di Timika mendapat tanggapan dari penduduk, melalui lembaga adat, Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme). Tanggapan masyarakat ini berkisar tentang dua permasalahan. Pertama adalah tidak jelasnya Komnas HAM dalam menilai pelanggaran HAM yang terjadi di Timika terutama dalam wilayah konsesi PT Freeport. Kedua, menurut masyarakat Komnas HAM tidak melakukan penyelidikan yang mendalam tetapi hanya mengoreksi laporan HFM Munninghoff ofin semata. Oleh karena itu tiga orang utusan suku Amungme datang ke Jakarta untuk meminta Komnas HAM turun kembali untuk meneliti secara cermat dan historis semua kasus-kasus pelanggaran hak-hak warga Amungme semenjak PT Freeport berdiri di Irian Jaya.

Selain itu masyarakat juga meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan seobjektif mungkin tanpa tekanan dari pihak lain sehingga bisa menentukan pelaku pelanggaran secara kongkret dan dapat memberikan rekomendasi secara jelas pada masyarakat. Juga diminta untuk mengurangi cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan dengan masyarakat. Selanjutnya meminta Komnas HAM menindaklanjuti segala temuannya secara lengkap dan utuh agar masyarakat tidak dirugikan.

Bertolak dari temuan Komnas HAM tersebut masyarakat mempertanyakan nasib 62 orang yang ditembak mati di Owea, 5 orang di Tsinga, 3 orang di Arwanop dan Tembapapura. Juga dipertanyakan nasib korban-korban pembunuhan, penahanan dan penyiksaan yang lainnya yang melibatkan aparat keamanan dan *security* Freeport selama Mei 1994 sampai Juni 1995. Menurut masyarakat telah jatuh korban sekitar 100 orang selama waktu di atas. Masyarakat juga meminta Komnas HAM untuk menyelidiki laporan dari ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) yang mengatakan adanya 37 orang korban bulan April 1995. Serta penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap orang Amungme setelah peristiwa tahun 1977 di Agimuga. Tom Beanal sebagai jubah suku Amungme ke Jakarta juga meminta pada Komnas HAM agar mendesak PT Freeport dan pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga korban dan mendesak pemerintah untuk menjamin agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Ketiga utusan suku Amungme itu juga mengajukan nasibnya ke Fraksi I DPR-RI 4

Maret 1996 di Jakarta. Di DPR mereka mengemukakan tuntutan sebagai berikut:

- Mendesak ABRI untuk meninjau kembali posisi pemihakannya dalam persengketaan antara masyarakat suku Amungme dengan PT Freeport.
- Mendesak diadakannya kembali perundingan tiga pihak antara Pemerintah, PT Freeport dan Masyarakat suku Amungme mengenai penyelesaian masalah tanah.
- Penarikan militer dari tingkat kecamatan dan daerah lebih kecil dan penempatannya hanya di Kabupaten saja. Di wilayah keca-

matan cukup ditempatkan polisi.

Bersamaan dengan pengaduan orang Amungme ke DPR-RI tersebut Komnas HAM dan Pangab kembali mengangkat masalah Timika. Pangab mengatakan bahwa dia tidak begitu saja menerima pengaduan dari ketiga orang itu. Oleh karenanya pihak ABRI akan mengadakan penyelidikan kembali, mengenai laporan hilangnya dan terbunuhnya beberapa orang Amungme lainnya. Komnas HAM untuk menyidik kebenaran laporan tersebut akan mengirim tiga orang wakilnya ke Timika, yaitu Bambang Suharto, Marzuki Darusman dan Asmara Nababan. (R)

Freeport dan Orang Amungme

Sejak tahun 1936, ketika ahli geologi Jean-Jacque Dozy melakukan ekspedisi ke Nieuw-Guinea (saat itu), orang Amungme sudah dikenal sebagai penghuni wilayah tersebut. Dalam ekspedisi itu mereka bekerja sebagai pengangkut barang dan penunjuk jalan. Moses Kilangin Tenbak, seorang Amungme yang bisa bicara dalam empat bahasa, membantu Forbes Wilson, direktur Freeport dari tahun 1966 sampai 1974. Dalam bukunya, *The Conquest of Copper Mountain*, yang terbit tahun 1981, Forbes Wilson mengatakan ekspedisi itu membuktikan bahwa gunung Ertsberg mengandung cadangan timah terbesar di dunia.

Dalam bukunya Wilson memuji-muji Moses, dan menyebutnya "penunjuk jalan yang sempurna". "seorang pengerah tenaga kerja", yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata penduduk. Ia mengakui bahwa tanpa bantuan Moses gunung timah itu takkan pernah mereka temukan.

Dalam Perjanjian Januari, yang dibuat tanggal 8 Januari 1974 antara orang Amungme, Freeport dan pemerintah Indonesia dinyatakan bahwa penduduk harus minta izin untuk masuk ke wilayah pertambangan Gunung Bijih, wilayah Tengogma di dekat tambang, Tembapapura, jalan-jalan, landasan terbang Timika Pad 11 dan Amamapare. Sebagai gantinya Freeport akan membangun pusat kesehatan, perumahan, pasar dan toko-toko, perumahan rakyat dan menyediakan lapangan kerja serta kantor-kantor pemerintah.

Bagi orang Amungme, pegunungan Jelsegel-Ongopsegel, yang oleh Freeport diberi nama Ertsberg dan Gunung Bijih, adalah keramat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gunung itu berubah menjadi lubang yang dalam saat menanda tangani perjanjian itu. Pegunungan itu adalah tempat bersemayamnya arwah nenek moyang.

Perjanjian Januari memang mencantumkan pegunungan itu, tapi tidak ada kesepakatan apapun tentang Grasberg yang sekarang sudah mulai dieksplotasi juga. Juga tidak ada pembicaraan tentang eksistensi orang Amungme dan sikap mereka tentang perluasan kegiatan perusahaan tambang tersebut.

Dengan memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma, Freeport sekaligus mengurus penduduk asli dari tempat tinggal mereka. Dan bersamaan dengan itu, mereka kehilangan kerangka berpikir yang selama ini memandu hidup mereka. Perpindahan itu juga berarti hancurnya identitas karena bagaimana caranya menyebut diri jika mereka hidup di atas tanah orang lain. Perpindahan itu berarti hilangnya pengetahuan mereka tentang dunia, pengobatan tradisional dan pengetahuan tentang cara menyambung hidup.

Bagaikan anak yang dipisah dari ibunya, orang Amungme makin sulit kehidupannya ketika dipisah dari tanahnya. Tempat tinggal yang baru menghilangkan rasa percaya diri, karena mereka merasa 'humpang' di atas tanah orang lain'. Semula mereka adalah pemilik tanah yang sah, dan sekarang hanya 'humpang'.

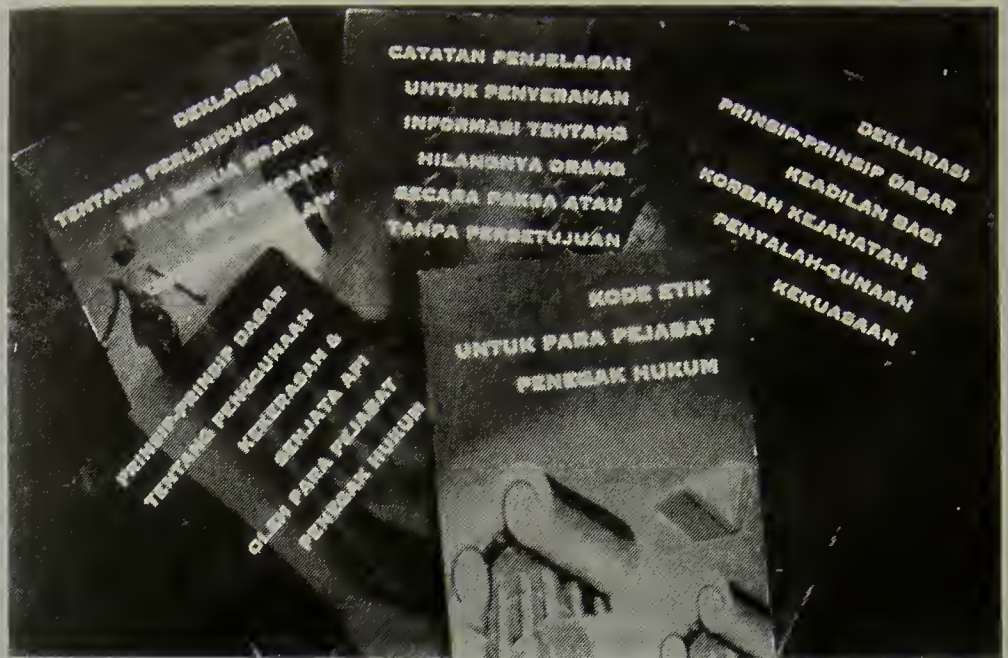
Tidak pernah terbayang dalam benak mereka bahwa akibat Perjanjian Januari itu mereka tidak boleh memakai rute-rute jalan yang sudah berabad-abad mereka pakai untuk berhubungan dengan desa lain. Mereka tidak pernah menyangka akan menjadi penonton saat kekayaan bumi mereka dibawa pergi orang lain.

Di Timika, sebuah kota yang disesaki pendatang, lahan garapan jauh lebih kecil dari tempat asal mereka. Sumber-sumber alamnya juga tidak sama. Hampir tidak ada tempat untuk beternak, padahal ternak sangat penting artinya bagi kehidupan orang Amungme. Dan ini semua adalah akar kemarahan mereka.

dan/Inside Indonesia, December 1995

Menyerap Norma-Norma Internasional Menjadi Hukum Nasional

Belum lama ini ELSAM menyelenggarakan roundtable discussion "Mengintegrasikan Standar-standar Internasional Mengenai Perlindungan Hak Atas Hidup ke Dalam Hukum Nasional Kita", berkaitan dengan peluncuran enam buku kecil yang merupakan dokumen resmi PBB mengenai hak untuk hidup. Berikut ini komentar dari Dr. Hasan Wirayuda, Direktur Organisasi Internasional Deplu RI pada acara tersebut.



Saya menyampaikan terimakasih saya atas inisiatif ELSAM mengadakan acara ini dan juga inisiatif ELSAM menerjemahkan dokumen internasional mengenai perlindungan HAM.

Dalam proses diskusi, merancang, dan pengesahan dokumen-dokumen resmi tersebut pemerintah Indonesia merupakan pihak (*state party*), yang ikut serta terlibat dalam keseluruhan proses perumusannya. Karena itu pemerintah berkewajiban itu sesungguhnya pemerintah Indonesia berkewajiban menyebarkanluaskannya. Dari segi ini, saya lihat, apa yang dilakukan oleh ELSAM mengenai dokumen ini say nilai suatu yang patut dihargai. Paling tidak usaha ini melengkapi yang mungkin belum sempat dilakukan oleh pemerintah.

Segi yang diliput dan kategori Dokumen

Dokumen Internasional itu adalah: (i) Kode etik untuk Pejabat Penegak Hukum; (ii) Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan; (iii) Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Pejabat

Pemerintah; (iv) Pencegahan Efektif terhadap Pelaksanaan hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Cepat; (v) Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Keseluruhan Dokumen ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas para penegak hukum (*law enforcement officials*). Baik mengenai substansi hal-hal yang mereka tangani, maupun prosedur bagaimana mencapai tujuan dari standar internasional.

Seperti kita ketahui, di dalam hukum internasional dibedakan antara produk hukum yang dikemas dengan perjanjian (*treaty*) dengan yang tidak. Yang dikemas dengan perjanjian-perjanjian mengikat seperti *convention* atau *covenant* biasanya disebut *hard-law*. Sementara yang tidak dalam bentuk perjanjian yang mengikat seperti *declaration* disebut *soft-law*. Dokumen-dokumen yang diterjemahkan ELSAM ini, kalau kita lihat sesungguhnya lebih merupakan sebagai *soft-law* dari *hard-law*. Dalam proses pengadopsiannya, produk hukum yang masuk kategori *soft-law* ini tidak memerlukan proses sesukar ratifikasi. Itu dari segi prosedur.

Dari segi substansi, yang dijabarkan dalam dokumen-dokumen resmi ini yang pal-

ing menonjol adalah yang berkaitan dengan perlindungan *right to life* (hak untuk hidup). Sering pengertian hak untuk hidup ini ditafsirkan secara lebih luas, termasuk didalamnya hak untuk mendapat rezeki yang lebih baik. Tapi sebetulnya *right to life* lebih diartikan pada hak mengenai penghormatan terhadap nyawa orang lain. Jadi bukan bagaimana bisa meningkatkan kekayaan, melainkan bagaimana nyawa orang lain apatut dihormati. Karena itu, yang menjadi perhatian dari dokumen-dokumen ini adalah mengenai penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum, yang terjelma dalam bentuk penahanan secara semena-mena (*arbitrary detention*), penyiksaan (*torture*), penghilangan (*summary execution*). Ini substansi yang diatur dalam dalam booklet-booklet kecil ini.

Jadi kalau kita lihat, walaupun dokumen itu kecil tetapi jangkauannya sebetulnya luas. Baik mengenai substansi yang memuat norma atau *value* tentang perlu dihindarkannya hal-hal tersebut. Maupun mengenai cara (prosedur) untuk tidak terjadi atau tidak sampai melakukan apa yang harus dihormati oleh para penegak hukum tersebut.

Sisi Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai tindak lanjut dari lokakarya nasional HAM yang kedua, yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober sampai 27 Oktober 1994 telah menetapkan tiga pilar kebijakan HAM. Pertama, ratifikasi atau adopsi berbagai instrumen internasional HAM. Pemerintah mencoba memperbaiki *record* atau catatan kita mengenai ini secara bertahap. Masalahnya dengan ratifikasi ini adalah soal bagaimana kita mengharmoniskan hukum *international standart* itu dengan *domestic rules and regulation*. Ini bukan tergolong pekerjaan yang mudah.

Selain itu, ratifikasi itu ada ekornya. Yakni membawa kewajiban tambahan untuk kita. Kewajiban itu adalah berupa membuat laporan secara berkala (*reporting obligation*). Paling sedikit ada lima konvensi yang memerlukan itu. Sebagai pemerintah kita harus menghitung, kalau kita ratifikasi satu konvensi pada tahun ini, maka sudah siap pada dua tahun mendatang membuat laporannya. Kita sudah punya pengalaman sebetulnya dengan dua konvensi, satu mengenai wanita dan satu lagi mengenai anak. Ini beban tambahan yang harus dihitung oleh birokrasi dalam meratifikasi. Jadi upaya harmonisasi merupakan sesuatu yang tidak mudah, tapi juga *reporting obligation* sebagai ekor atau akibat ratifikasi ini juga harus sudah kita perhitungkan. Soalnya adalah bagaimana yang menangani ini.

Pilar yang kedua adalah *dissemination* dan *education*. Ratifikasi itu sendiri termasuk pekerjaan yang relatif mudah, tapi kalau hanya tersangkut dalam lemari file tidak ada gunanya. Bagaimana menyebarluaskan ini, baik di sisi pendidikan formal, informal maupun melalui media massa. Ini satu tantangan sendiri yang merupakan kelemahan utama kita.

Kita harus jujur, *human rights* belum pernah dijadikan objek studi di universitas kita. Pengajaran HAM di universitas kita baru menyentuh hal-hal yang general. Itu adalah kenyataan. Kalau kita mau tahu secara detail tentang 25 konvensi PBB mengenai HAM, saya kira kita memerlukan paling sedikit 25 orang PhD di masing-masing bidang. Ini tantangan kita. Jadi kalau pemerintah memutuskan, ok! saya niat untuk meratifikasi, dan memang *political will is there*, tetapi jalan birokrasi merambat ke arah sana sangat lambat. Ini saya kira perlu kita ketahui.

Saya sambut baik ketika ELSAM datang dengan sesuatu yang kongkrit. Konvensi mengenai *torture* itu diterjemahkan, bahkan lebih dari itu ELSAM merancang undang-undang pengesahannya. Saya kira, dari sisi kami yang sehari-hari menangani masalah ini upaya ELSAM itu satu kontribusi yang positif

dan kita hargai. Sebab bisa dibayangkan pada proses pemerintah, hal ini jalannya kadang-kadang tidak secepat yang kita harapkan. Kalau ada produk-produk seperti ini akan memperlancar pekerjaan pemerintah. Tidak berarti kita lalu *excuse* untuk tidak melakukan itu, tapi *understanding* mengenai itu perlu juga diketahui.

Pilar yang ketiga, yang akan kita garap adalah *priority issues*. Isu-isu apa yang sebetulnya selama ini yang kita hadapi dalam HAM. Kalau kita lihat pengertian hak-hak asasi yang disepakati konsensus di konferensi Wina, maka hak asasi diartikan tidak hanya hal sipil dan politik tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya. Jadi ada satu kelengkapan yang juga sesuai dengan kesepakatan Wina, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama.

Sisi yang sekarang, yang ingin ditangani pemerintah sebagai *issue priority* adalah sisi yang selama sering memberikan citra buruk pada *record* capaian kita di bidang hak asasi manusia. Yaitu segi-segi yang menyangkut *right to life*, berupa bebas dari penyiksaan, penahanan yang sewenang-wenang, penghilangan secara paksa dan hukuman mati di luar proses hukum. Karena itu apa yang dilakukan oleh ELSAM untuk menerjemahkan dan mengangkat isu ini sejalan dengan pemikiran kita. Tapi selain itu, dalam *right to life* itu kami juga memasukkan pengentasan kemiskinan ke dalamnya. Dari pandangan kita kemiskinan adalah suatu hambatan untuk penikmatan HAM.

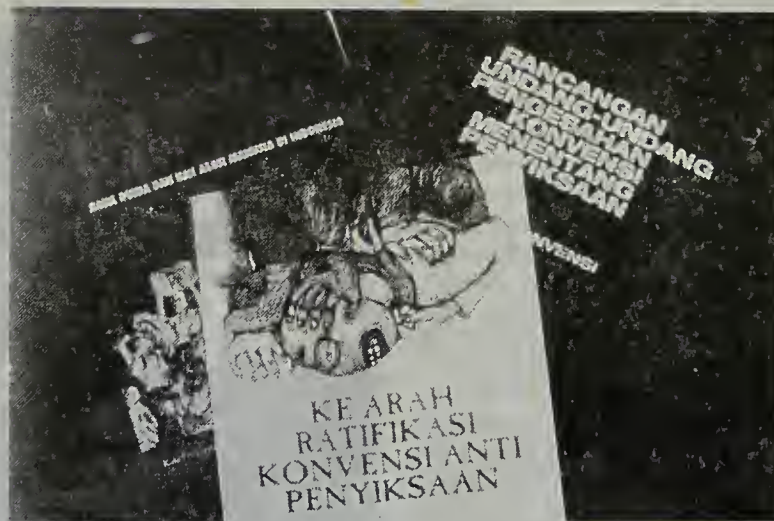
Pengadopsiannya ke Hukum Nasional

Kembali kepada dokumen-dokumen tadi, seperti saya katakan di awal, dokumen ini masuk ke dalam kategori *soft-law*. Pengadopsiannya ke dalam hukum nasional lebih mudah, dan tidak memerlukan ratifikasi.

Ada dua pendekatan dalam proses pengadopsian norma internasional ke dalam hukum nasional. Pertama pendekatan label dan kedua pendekatan substansi dari pendekatan label. Saya ambil contoh, misalnya dalam sejarah perkembangan hukum. Ada produk-produk yang seringkali di adopsi ke dalam sistem hukum kita tanpa kita ketahui dari mana sumbernya atau labelnya. Ini terlihat pada hukum perkawinan. Banyak konsep hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan kita sebetulnya adalah konsep hukum islam. Tapi ketika menjadi hukum nasional kita tidak mengasih label hukum perkawinan itu sebagai hukum islam.

Saya cenderung melihat perlunya pendekatan yang substantif. Yang penting adalah bagaimana *foreign values* itu kita scrap tanpa orang lain tahu dari mana sumbernya, tapi dirasakan sebagai bagian dari miliknya. Kebetulan dokumen ini dokumen resmi, yang kita tidak perlu khawatir. Secara substantif kita dapat mengadopsi perangkat hukum yang memuat standar internasional ini ke dalam hukum nasional. (ik)

TERBITAN BARU



Atas Nama Pembangunan (191 halaman)

Ke Arah Ratifikasi Konvensi Penyiksaan (201 halaman)

Rancangan Undang-undang Konvensi Menentang Penyiksaan

Peminat hubungi ELSAM, Jl Kampung Melayu Besar 44, Jakarta 12840
Tel (021) 829 605 - Faks (021) 835 3690 - E-mail: elsam@nusa.or.id

Buruh CV Maska Jombang Berjuang

Rangkaian aksi buruh CV Maska Perkasa mungkin adalah aksi buruh paling lama dalam sejarah Orde Baru. Berikut adalah kisah perjuangan mereka menuntut hak-haknya.

Aksi-aksi yang dilakukan buruh CV Maska untuk menuntut hak-hak mereka memakan waktu yang panjang dan melelahkan, mulai dari tanggal 10 April 1995 sampai dengan Desember 1995. Aksi buruh muncul akibat pihak perusahaan tidak membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan UMR. Aksi buruh ini kemudian melibatkan aparat keamanan, pemda, DPRD dan mahasiswa serta pemuda. Dari keseluruhan aksi buruh ini, yang paling dramatis tentu kejadian pembubaran aksi buruh oleh pihak keamanan dari Yon 521 Kostrad Kediri, Brimob Surabaya dengan personil 350 orang menjelang magrib tanggal 17 Oktober 1995. Jumlah aparat keamanan semakin membengkak ketika bantuan datang dari Polres dan Kodim setempat.

Aksi buruh tanggal 16 Oktober 1995 di depan Depnaker Jombang berjumlah 2.600 yang sebagian besar perempuan ini bertujuan menuntut pembayaran upah mereka, yang hampir empat bulan belum dibayar, beserta tunjangan-tunjangan sosial lainnya oleh perusahaan. Setelah perundingan antara buruh dengan direktur perusahaan Bing Hiantoro, yang memakan waktu cukup lama dan tidak membuahkan hasil yang memuaskan, perusahaan malah menyatakan pailit dan akan melakukan PHK massal. Padahal SK Menaker tanggal 14 September 1995 menyatakan CV Maska berada dalam keadaan sehat dan mampu untuk membayar upah buruhnya sesuai dengan UMR yang berlaku. Karena tidak ada kesepakatan, buruh tetap melanjutkan aksinya dan bahkan berniat akan bermalam di halaman Kantor Depnaker itu.

Buruh bertahan di halaman sampai pukul 21.00 dan meminta pihak perusahaan melakukan dialog terbuka dengan buruh di halaman. Hal ini dipenuhi oleh perusahaan, tetapi apa yang dinyatakan wakil perusahaan ditolak oleh buruh, kemudian perundingan diadakan kembali di dalam kantor dengan keputusan bahwa PHK tetap diadakan dengan pesangon, uang cuti haid akan dibayar, gaji yang belum dibayar akan dibayar bulan November beserta uang rapelnya. Sementara Astek akan dibayar Januari 1996. Tawaran PHK ditolak oleh buruh.

Mogok berlangsung hingga besoknya dengan jumlah yang semakin besar. Setelah

kembali berunding, keputusan perusahaan disampaikan melalui kepala Depnaker Jombang Drs Gunawan. Intinya, perusahaan tetap pada keputusan kemarin. Buruh pun tidak berubah pendirian. Melihat ketegaran sikap ini, Drs Gunawan meminta buruh membubarkan diri, dan jika tidak, persoalan akan diserahkan pada pihak keamanan.

Karena buruh belum juga membubarkan diri pada tanggal 17 Oktober 1995 pihak keamanan mulai mendatangi tempat buruh bertahan. Sekitar pukul 17.00 WIB serombongan tentara dengan persenjataan lengkap dan siaga penuh memblokir halaman Depnaker Jombang. Buruh yang tidak memiliki pertahanan apa-apa kecuali semangat tidak bisa bertahan di hadapan rombongan pihak keamanan. Mereka keacir-aciran dan membubarkan diri. Buruh yang mencoba bertahan mengalami perlakuan kasar dan amoral. Menurut penuturan salah seorang buruh perempuan, dalam keadaan yang tidak menentu oleh serbuan aparat keamanan tersebut, ia pingsan dan ketakutan. Di saat pingsan itulah tubuh mereka digerayangi oleh tangan-tangan kekar. Sedangkan seorang

buruh pria yang berada di lokasi juga menjadi korban. Dia diangkat dan dijatuhkan di atas teman-temannya sendiri kemudian ditampar dan ditendang sehingga mengalami luka-luka memar. Sebagian buruh lainnya ditangkap lalu dilemparkan ke atas truk yang telah disediakan. Akibat tindakan aparat keamanan 13 orang buruh dirawat di RSUD Jombang.

Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa

Tindak kekerasan aparat keamanan diprotes kalangan pemuda dan Mahasiswa Darul Ulum. Melalui Komite Solidaritas untuk Buruh Maska (KSBM) mereka melakukan protes ke DPRD Tk II Jombang tanggal 18 Oktober 1995. Dalam relinya KSBM menyampaikan pada masyarakat luas bahwa telah terjadi tindakan kekerasan oleh aparat terhadap buruh CV Maska. Aksi KSBM ini mendapat sambutan masyarakat. Jumlah peserta aksi yang semula 200 orang menjadi 500 orang ketika sampai di depan DPRD. Dialog yang mereka minta dengan Fraksi ABRI tidak membuahkan hasil karena fraksi menolak jika KSBM tidak mau dialog tertutup dan dengan perwakilan. Aksi selanjutnya diarahkan ke Polres Jombang.

Aksi protes mahasiswa dan pemuda ini mendapat tanggapan dari Bupati Jombang Soewoto Adiwibowo yang menyangkal adanya tindak kekerasan. Menurutnya, yang ada hanya 13 buruh yang pingsan karena kelelahan dan sudah dirawat di RSUD Jombang. Tanggal 20 Oktober 1995 KSBM kembali mengadakan reli dengan massa 1.500 orang, yang terdiri dari buruh, santri, pemuda, mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya. Di depan anggota dewan para buruh yang



Kronologi Aksi Buruh Jombang

mengalami tindak kekerasan, menyampaikan keluhan tentang masalah mereka dan tindak kekerasan yang dialami. Keluhan buruh ini hanya disambut dengan tertawa oleh para anggota dewan. Karena kurang puas reli kemudian diarahkan ke kantor Bupati, mereka ditolak dengan alasan rapat. Sebelum bubar, buruh dan pemuda sepakat akan datang kembali dengan massa yang lebih besar.

Aksi dan reli buruh KSBM ini mengundang reaksi dari Danrem 082 Jombang dan Pangdam Brawijaya. Keduanya mengatakan bahwa aksi tersebut didalangi orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pernyataan Pangdam ini berhubungan dengan hadirnya Muehtar Pakpahan di Jombang. Pangdam juga menyangkal adanya buruh yang dirawat di rumah sakit, dan bahkan menyatakan akan menuntut Hambali. Ketua HMI Jombang, karena menuduh ABRI bertindak kasar pada buruh.

Ketika KSBM akan mengadakan aksi untuk ketiga kalinya mereka dihadang oleh segerombolan pemuda yang mengaku dari Gerakan Cinta Jombang. Dalam rombongan ini terlibat beberapa pemuda dari GP Anshor seperti Muslieh Affandi dan Muhdhor. Bahkan di antara mereka juga ada aparat Penda, Kepala desa Kepuhlosari dan Kades Daperkejambon. Dalam aksi ini GCJ mengecam aksi yang dilakukan buruh dan KSBM. Ketika GCJ ini bergerak ke kampus UNIDAK, mereka dibubarkan oleh aparat. Aksi tandingan ini menurut Pangdam terjadi karena ketidak senangan GCJ terhadap aktivis yang selalu menyudutkan aparat keamanan dan Penda. Pada kesempatan yang sama Pangdam juga menyatakan akan mengusut secara tuntas siapa dalang aksi buruh tersebut.

Perjuangan buruh menghadapi tindakan aparat keamanan berakhir dengan PHK massal oleh CV Maska. Ketika buruh meminta penelehan iuran SPSI sebesar Rp 7 juta, juga tidak diperkenankan oleh ketua DPC SPSI Jombang. Alasannya karena surat tuntutan mereka memakai kop surat berecap KABUT (Kaum Buruh Tertindas), organisasi buruh yang dinilai liar oleh ketua DPC SPSI Jombang.

Perjuangan buruh di pengadilan juga menemui jalan buntu setelah PN Jombang memutuskan perusahaan dalam keadaan pailit. Sementara itu buruh tetap menuntut haknya karena hak atas upah itu tidak ada hubungannya dengan kepailitan perusahaan. Jika hak buruh tidak dibayar berarti perusahaan melakukan tindak pidana. Hak buruh tersebut adalah upah pada hari libur besar dan resmi selama 28 hari dalam dua tahun 1994-1995 senilai Rp 345 juta lebih; THR Rp 553 juta sesuai dengan keputusan Menaker 1994; dan uang cuti tahunan keseluruhan buruh, senilai Rp 260 juta lebih.

10 April. Sekitar 1.000 orang buruh CV Maska Perkasa yang sebagian besar perempuan melakukan mogok kerja untuk menuntut upah sesuai dengan UMR yang berlaku sebesar Rp 3.450/hari. Sebelumnya mereka hanya menerima upah Rp 2.850/hari.

11 April. Sekitar 1.500 orang buruh bagian Ginza mogok di depan pabrik menuntut UMR, tetapi tanpa hasil.

17 April 1995. 2.000 orang buruh melakukan reli ke DPRD untuk mengadakan perusahaan. 18 April buruh kembali mengadakan dialog dengan DPRD, malah DPRD mengatakan perusahaan dalam keadaan pailit.

12 Mei. Buruh mengadakan perusahaan ke Menaker di Jakarta karena meliburkan 600 orang buruh unit lasting dan 1.000 orang bagian jahit tanpa upah pokok. Diadakan juga bahwa 35% dari 3.000 orang buruh tidak terdaftar Astek dan pemutasian yang dilakukan semena-mena.

16 Mei. Hampir 3.000 orang buruh mogok dan mengajukan tuntutan upah dan jamsostek. Buruh kembali mengadakan mogok keesokan harinya menolak upah sebesar Rp 3.000/hari.

18 Mei. Buruh tetap mogok menuntut UMR serta uang cuti haid dan cuti tahunan.

27 Mei. BBD yang bertindak sebagai konsultan SDM CV Maska berjanji akan mengabulkan permintaan buruh.

24 Juni. Buruh kembali menanyakan kenaikan UMR yang telah dijanjikan kenaikannya sekali tiga bulan dan melakukan mogok dua hari karena terlambatnya pembayaran upah.

30 Juni. Buruh kembali kecewa karena perusahaan tidak bersedia membayar upah sebesar Rp 3.150 sebagaimana disepakati dalam perundingan dengan BBD. Malah perusahaan menyangkal dengan mengatakan BBD bukan manajemen CV Maska.

8 Juli. Buruh mogok total selama dua hari karena terlambatnya pembayaran upah.

25 Juli. Mogok kembali bergulir di Unit I untuk memprotes tindakan seorang manajer yang kasar pada buruh.

14 Agustus. Buruh mogok kerja dalam rangka solidaritas pada dua orang teman yang dipecat dengan tuduhan memukul kepala bagian produksi unit II.

16-26 Agustus. Perusahaan meliburkan buruh dan menghentikan proses produksi. Selama diliburkan para buruh mencoba mengusut uang Astek tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari perusahaan.

6 September. Buruh melakukan aksi di depan kantor Astek Mojokerto. Dari perundingan diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kecurangan dalam membayarkan Astek para buruh.

14 September. Buruh menerima SK Menaker tentang penolakan atas penangguhan pembayaran UMR di CV Maska. SK itu juga mengatakan bahwa kondisi perusahaan sehat dan wajib membayar penuh UMR terhitung dari 1 April sampai 13 September 1995.

23 September. Perusahaan mengajukan pembayaran upah hanya sebesar 50% tetapi ditolak oleh buruh.

1-3 Oktober. Terjadi mogok total karena buruh tetap menuntut upah sesuai dengan UMR yang berlaku. Aksi Mogok buruh ini dijawab perusahaan dengan menghentikan proses produksi. Setelah itu diadakan perundingan untuk kerja giliran. Masalah upah serta tunjangan lainnya akan dibicarakan kemudian.

11 Oktober. Kesepakatan yang pasti tentang upah dan pekerjaan tetap belum tercapai. Sementara itu perusahaan terus mengatakan keuangan perusahaan tidak sehat dan pailit. Perundingan terus terjadi antara buruh dengan perusahaan sampai tanggal 14 Oktober tetapi tidak membuahkan hasil.

16-17 Oktober. Buruh demonstrasi di depan Kantor Depnaker Jombang. Demonstrasi yang melibatkan 2600 orang buruh ini sampai menyandera pimpinan perusahaan agar mau berunding dengan mereka untuk menyelesaikan persoalan.

17 Oktober. Menjelang magrib aksi buruh ini dibubarkan dengan paksa oleh aparat keamanan. Dalam pembubaran inilah terjadi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh yang sebagian besarnya adalah perempuan. Setelah itu aksi tetap berlanjut dengan dukungan mahasiswa di pabrik dan turun ke jalan untuk menuntut pelaku tindak kekerasan oleh aparat keamanan.

(R. NK. YY)

Buruh Mogok Menuntut UMR dan Hak Berorganisasi

UMR dan Organisasi

Awal tahun 1996 gelombang pemogokan buruh kembali mewarnai dunia industri Indonesia, terutama Jawa. Pemogokan terjadi selama dua bulan awal tahun ini karena empat persoalan, yaitu tidak dibayarkannya UMR sesuai dengan keputusan Menaker No. 12/1995; terhalangnya hak untuk mendirikan organisasi; PHK secara sepihak; dan THR yang tidak dipenuhi.

Beberapa perusahaan keberatan dengan ketentuan UMR dengan alasan bahwa perusahaan belum mampu dan dinilai akan mengurangi daya saing produk di pasaran. Keluhan pengusaha ini muncul dalam praktek di Jawa Timur, di mana 84% perusahaan tidak membayarkan upah sesuai dengan UMR. Bahkan ada perusahaan yang merekayasa komponen upah dengan memasukkan tunjangan-tunjangan lainnya sehingga seolah-olah telah memenuhi UMR yang berlaku, sebesar Rp 3.700. Para pengusaha juga mengemukakan bahwa mereka tidak membayar upah buruh sesuai dengan UMR karena lingginya *uang siluman* yang harus disetorkan pada berbagai aparat birokrasi.

Sikap pengusaha ini ditanggapi oleh rangkaian pemogokan secara terus menerus di Jawa Timur. Hampir 46% di antaranya terjadi karena tidak dibayarkannya upah

sesuai dengan UMR.

Sepanjang tiga bulan terakhir ini di Jakarta dan Jawa Barat juga terjadi gelombang pemogokan buruh yang menuntut diberlakukannya UMR. Misalnya di *PT Fajar Sun Master*, Tangerang, buruh mogok menuntut upah yang sesuai dengan UMR dan hak untuk mendirikan organisasi serta tunjangan kesehatan. Pemogokan seperti ini juga terjadi di *PT Indo Tri Jaya*, Jakarta Timur. Sekitar 500 buruh menuntut perusahaan membayarkan upah sesuai dengan prestasi dan lama kerja. Mereka juga menuntut status mereka sebagai pekerja lepas harian menjadi pekerja tetap dengan membuat KKB.

Di *PT Djon Gunawan Texindo* yang memproduksi benang pintal di Tangerang, ratusan buruh melakukan mogok kerja menuntut kenaikan upah secara berkala. Untuk menghentikan protes buruh, perusahaan mendatangkan pihak keamanan dari Polres Tangerang dan Kodim. Aksi mogok dramatis menuntut THR di *PT Mulia Grup* yang memproduksi keramik terjadi dengan penyanderaan beberapa orang wartawan dan petugas. Para buruh menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum pihak perusahaan mengabulkan permintaan mereka seperti

pembentukan SPSI, pembayaran bonus dan THR. Organisasi yang ada selama ini di tingkat perusahaan menurut para buruh tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka, karena para pengurusnya kebanyakan ditunjuk oleh pihak pengusaha.

Sementara itu tuntutan buruh agar THR tidak dipotong pajak ditolak oleh perusahaan. Pimpinan perusahaan bahkan menilai permintaan buruh sudah di luar tuntutan normatif. Selain itu tindakan buruh juga dikatakan ditanggapi oleh pihak luar.

Tanggal 9 Februari ratusan buruh *PT Sinintama Garmetindo*, Jakarta Barat, mogok kerja selama dua hari karena perusahaan PMA ini tidak memenuhi UMR dan THR. Selain itu para buruh juga meminta pihak perusahaan untuk menindak kepala produksi, supervisor dan satpam yang dinilai kejam oleh buruh.

Di *PT Hong Nam Jaya*, Bekasi, 800 orang buruh mogok kerja menuntut dibayarkannya upah mereka yang belum dibayarkan, serta meminta keringanan lembur karena kerja lembur tidak dibayar.

Masih di Jakarta buruh *PT Elteha Internasional Ltd* juga mogok kerja menuntut upah mereka dibayar sesuai dengan UMR yang berlaku. Di perusahaan ini juga tidak ada hari libur sementara upah lembur juga tidak pernah mereka terima.

Masalah THR

THR menjelang lebaran ini rupanya juga menjadi pieu ledak dari pemogokan buruh. Meskipun THR hanya bersifat temporal tetapi cukup banyak pengusaha yang mengabaikannya, sehingga mengundang protes buruh.

Buruh di *PT Mulia Prastindo* ini menolak diterapkannya PPh atas THR yang mereka terima. Buruh yang berjumlah 5.000 orang ini juga menuntut bonus dan kebebasan berorganisasi. Pemogokan ini dihentikan oleh polisi, menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan.

Di *PT Sin In Garment* 300 orang buruh mogok menuntut THR, upah lembur dan pembentukan SPSI serta Jamsostek. Selama bekerja di PT SIG, para buruh mengaku bahwa mereka selalu dibayar di bawah UMR.

Di *PT Frans Brothers Sejati*, Tangerang, 1.000 buruh mogok menuntut THR yang layak karena mereka hanya menerima sekitar Rp 15.000 sampai Rp 70.000. Buruh yang sebagian besar perempuan ini juga menuntut kenaikan upah sesuai dengan UMR. Aksi mogok buruh perempuan di PT FBS dibubarkan dengan tembakan oleh pihak Kepolisian dan Kodim Tangerang.

Sedangkan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara banyak buruh melakukan unjuk rasa karena seminggu menjelang



lebaran THR mereka belum dibayar oleh perusahaan. Hal ini terjadi di *PT Polygama Nusantara*, Padang. 110 orang buruh pabrik sengketa ini kemudian mengadu ke DPRD.

Masalah PHK

Dua bulan terakhir ini juga diwarnai tindakan PHK di beberapa perusahaan. PHK terjadi di *CV Surya Kreasi Texprindo*, Solo sebanyak 28 orang tanpa pesangon yang memadai. PHK ini dijatuhkan pada buruh harian dan bulanan yang tidak memiliki kontrak kerja dan surat bukti sebagai buruh pabrik. Buruh di perusahaan ini diupah Rp 3.000/hari untuk buruh harian dan Rp. 8.000 untuk buruh borongan tanpa tunjangan lainnya.

Sedangkan di Bekasi, *PT Leokorinsta* yang memproduksi boneka asal Korea mem-PHK 7 orang buruhnya tanpa pesangon karena menolak kerja lembur pada hari Sabtu. Menurut para buruh di perusahaan ini upah buruh juga berada di bawah ketentuan UMR, sedang upah lembur tidak pernah dibayar. Perusahaan juga menolak pembentukan organisasi untuk buruh.

Di Semarang 300 buruh *PT Batamtex* semenjak tanggal 1 Februari telah di-PHK dengan ancaman untuk menandatangani surat pengunduran diri. PHK ini terjadi karena pabrik mulai memakai mesin baru.

Di Manado, *PT Celebes Minahasa Surya Adira* mem-PHK 260 buruhnya secara paksa dengan alasan kehabisan bahan baku tapioka. PHK dilakukan pihak perusahaan dengan memaksa para buruh menandatangani surat pengunduran diri.

Lain lagi di Pekalongan. Karena tidak mampu untuk membayar THR, *PT Panisatex* merumahkan untuk sementara 170 orang buruhnya dengan uang tunggu 50% upah biasa. Dengan sendirinya peluang buruh untuk mendapat THR menjadi hilang.

Kasus yang hampir serupa juga terjadi di Aceh. Sekitar 40 orang buruh *PT Gunung Raya Utama Timber Industri* "dirumahkan" dengan alasan kekurangan bahan baku. PHK tanpa pesangon juga terjadi di dua perusahaan di Tangerang, yaitu *PT Kinarya Ahipra* dan *PT Virgo Ria*. Kedua perusahaan itu mem-PHK 279 buruhnya dan tidak memberikan THR kepada buruh.

Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa masalah perburuhan pada awal tahun 1996 ini tidak jauh berbeda dari masalah perburuhan tahun lalu. Masalah PHK, hak berorganisasi, upah (UMR) serta tunjangan lainnya masih menjadi persoalan. Selama persoalan tersebut tidak terselesaikan maka buruh juga akan tetap menuntut hak-haknya. Kondisi di atas juga memperlihatkan rentannya industri manufaktur Indonesia, terutama di bidang garment, elektronik dan tekstil. (R)

Buruh Kontrak

Tanggal 27 November 1995 ELSAM mengeluarkan hasil studi mengenai penggunaan buruh kontrak dengan pola Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu (KKUWT), dan dampaknya terhadap kepentingan dan hak-hak buruh. Penelitian ini dilakukan di 40 perusahaan, yang meliputi 22 perusahaan di Tangerang, 3 di Jakarta dan 15 perusahaan di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak dipakai pada semua jenis pekerjaan. Di Tangerang dari 22 perusahaan yang diteliti, 10% sampai 90% buruhnya bekerja dengan sistem kontrak. Sedangkan di Jawa Timur, jumlah buruh kontrak antara 5% sampai 60%.

Laporan studi berjudul *Sistem Kerja Kontrak Menjelang Era Persaingan Bebas: Sebuah Studi Awal* memperlihatkan banyak perusahaan yang menggunakan buruh kontrak mengabaikan begitu saja hak-hak buruh. Secara definitif yang dimaksud buruh kontrak adalah buruh yang bekerja insidentil: yang bekerja pada perusahaan tidak secara berkesinambungan baik karena waktu maupun jenis pekerjaannya. Sistem kontrak, menurut data yang ada, sekarang ini semakin banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia terutama di sektor garment dan tekstil serta elektronik. Kecenderungan ini terlihat dari pengajuan kembali permohonan kontrak kerja dari buruh-buruh yang sebelumnya bekerja permanen.

Buruh kontrak dalam industri Indonesia tidak sesuai dengan definisi di atas, karena buruh kontrak menjadi justru tulang punggung di pabrik, dan dalam kenyataannya mereka bekerja secara permanen dengan perpanjangan kontrak sekali 3 atau 6 bulan.

Perusahaan yang mempekerjakan buruh kontrak tidak membuat KKB melalui organisasi buruh tetapi hanya membuat perjanjian kerja secara individu. Dalam masa percobaan 3 bulan pertama jika tidak tercapai target produksi maka PHK terhadap buruh kontrak akan terjadi. Dengan sendirinya *security of work* dan *rights to work* tidak terjamin. Dengan sistem kontrak perusahaan tidak memberikan jaminan sosial dan ekonomi terhadap buruh.

Dalam hubungan kerja kontrak, upah minimum seringkali dijadikan patokan upah tertinggi. Di dalamnya sudah masuk upah pokok dan semua jenis tunjangan. Dengan demikian hak buruh untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan aturan, apalagi sesuai dengan hasil produksinya, telah diingkari. Buruh kontrak juga dituntut bekerja dengan jam kerja panjang untuk mencapai target produksi. Karena sifat kontrak itu tidak tetap dan sistem kontrol yang lemah, maka seringkali terjadi pelanggaran aturan jam kerja.

Dengan sistem kontrak perusahaan juga terlepas dari kewajiban memberikan fasilitas-fasilitas lainnya seperti biaya kesehatan, hari libur, hak cuti, dan serta cuti haid untuk buruh perempuan. Tidak adanya keamanan dan ketenangan kerja, karena selama bekerja pihak perusahaan mudah saja mem-PHK dengan dalih kelangkaan bahan baku atau habisnya masa kontrak setelah 3 bulan kerja. Oleh karena itu hak buruh untuk mendapat pekerjaan atau menuntut perusahaan yang melakukan PHK sepihak, menjadi hilang.

Buruh kontrak banyak dipekerjakan di industri tekstil dan garment, yang kebanyakan adalah industri sub-kontrak dari negara industri maju atau negara industri baru (NIB) seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Perusahaan sub-kontrak ini hanya memproduksi pesanan dari perusahaan induknya untuk menutupi pesanan, dan jika pesanan telah tercapai atau bahan baku tidak tersedia perusahaan akan melakukan PHK sepihak. Dalam sistem ini dengan sendirinya perusahaan terlepas dari beban pemberian pesangon, dan nasib buruh kontrak tidak ada bedanya dengan buruh borongan lepas.

Kontrak kerja yang terbatas, terabaikannya hak berorganisasi membuat buruh tidak bisa berkomunikasi dengan sesamanya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Buruh tidak mampu melindungi dirinya dan selalu tunduk pada kepentingan pengusaha dan penguasa. Dengan demikian posisi buruh sebagai penjual tenaga kerja makin tegas.

Melihat indikasi diingkarinya hak-hak buruh seperti hak mendapatkan upah yang layak, hak berorganisasi, tidak adanya Jamsostek, selalu terancam PHK, ELSAM menyampaikan rekomendasi kepada Menaker untuk

- Menebakut Peraturan Menaker No.Per 02/Men/1993 tentang KKUWT, karena peraturan tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan standar internasional mengenai perlindungan hak-hak buruh.
- Mendesak Menaker untuk mengakui hak-hak buruh untuk berorganisasi secara bebas di luar SPST.
- Meminta pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO No.87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat.

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

Jl. Kampung Melayu Besar No.44
Jakarta 12840 Indonesia.
Phone (021) 8296905, 8353690, Facs 8353690.

Pembukaan

Menurut UUD '45 Negara Hukum Indonesia didasarkan atas Asas-asas:

- Kedaulatan Rakyat
- Persamaan di depan hukum dan pemerintahan
- Keseimbangan kekuasaan dan hubungan saling mengontrol (*Check and Balance*) diantara badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

• Azas-azas Negara Hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 45 merupakan landasan untuk membangun masyarakat bernegara hukum yang demokratis dan berkeadilan dalam wilayah Republik Indonesia.

• Membangun masyarakat bernegara hukum mensyaratkan tidak hanya membangun institusi-institusi Negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (eksekutif), badan perwakilan rakyat (legislatif) dan peradilan (yudikatif), tetapi mensyaratkan pula ikhtiar yang terus menerus untuk membangun masyarakat yang kuat yang mampu berperan serta dalam pembangunan negara hukum tersebut.

• Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun, bahwa pembangunan institusi-institusi Negara yang tidak diimbangi dengan ikhtiar untuk membangun masyarakat yang kuat akan membawa akibat timpangnya hubungan antara masyarakat dengan negara, yang pada gilirannya dapat melahirkan berbagai bentuk tindakan dan kebijakan yang melanggar hak-hak masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai individu maupun kelompok.

• Disadari bahwa selama lebih dari dua dasa warsa telah dilakukan usaha-usaha untuk membangun dan memperkuat institusi-institusi negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, badan perwakilan dan peradilan. Akan tetapi usaha-usaha tersebut masih harus diimbangi dengan dibukanya peluang dan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk menumbuhkan kekuatannya baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Asas

Pasal 2

Yayasan ini berdasarkan Pancasila

Maksud dan Tujuan

- Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai yang terpancar dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Mengupayakan pembaharuan hukum dan kebijakan (*law and policies*) yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokratis serta kepentingan masyarakat.

Usaha-usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan akan mengusahakan:

- Melakukan pengkajian terhadap kebijakan (*policies*) dan atau hukum (*law and regulation*) penerapannya serta impaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- Mengembangkan gagasan dan konsepsi atau policies atau hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- Melakukan advokasi dalam berbagai bentuk pemenuhan hak-hak kepentingan masyarakat yang berkeadilan.
- Menyebarluaskan informasi berkenaan gagasan konsepsi kebijakan (*policies*) atau hukum yang berwawasan demokrasi dan keadilan di kalangan masyarakat luas.

Pengurus

Ketua

Direktur Eksekutif

Anggota

drs. Hadimulyo, Msc.

Abdul Hakim G. Nusantara SH, LL.M.

Asmara Nababan, SH.

Ir. Agustinus Rumansara, Msc.

Sandrayati Moniaga, SH.

Staf

Ifdhal Kasim, SH.

E Rini Pratsanawati.

Widoyoko, SH.

dra. IGA Putri.

Adriana Wittyasuki Surono

Terbitan ELSAM

Tim Peneliti ELSAM *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum terselesaikan* ELSAM, 1995 dengan Kata pengantar DR. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. Buku yang mulai diedarkan Desember 1995 ini mengungkapkan secara faktual beberapa kasus kekerasan pejabat publik terhadap rakyat di berbagai daerah Indonesia yang sampai kini belum terselesaikan. Kasus tersebut adalah, kasus Aceh, kasus tanah Sei Lapan, kasus HKBP, kasus teror terhadap aktivis Baruh Medan, Kasus PHK dan terbunuhnya Marsinah, Kasus pengadilan sandiwara tersangka pembunuhan Marsinah, kasus penembakan petani Nipah, Madura, tuduhan PKI terhadap petani Kedung Ombo, tindakan kekerasan terhadap Aksi solidaritas anti pembredelan pers. dan Kasus Liquisa. Buku ini juga berisi pola dan macam-macam bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik.

ELSAM & LCHR *Atas Nama Pembangunan, Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* ELSAM, 1995

Buku ini diangkat dari laporan bersama ELSAM dan LCHR yang membahas dampak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia di Indonesia, terutama dampaknya dari segi hak asasi manusia. Fokus dari isi buku adalah dampak proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo dan program Keluarga Berencana.

ELSAM, *Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan* ELSAM, 1995.

Buku ini berisi tentang terjemahan pasal-pasal konvensi PBB tentang penentangan penyiksaan oleh pejabat publik dan Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi konvensi PBB tersebut.